1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 2 0



Tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Tempo

Berkurang Suntikan Modal untuk Perusahaan Daerah

Anggota Dewan mengusulkan agar penyertaan modal untuk proyek strategis tidak banyak dipangkas.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengusulkan agar pemerintah DKI Jakarta tidak banyak memangkas anggaran penyertaan modal daerah untuk sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD). Sebab, sebagian perusahaan itu mendapat penugasan kegiatan strategis daerah (KSD) dari pemerintah

Anggota Komisi Bidang Keuangan DPRD DKI S. Andyka menyarankan agar suntikan modal dikurangi sebagian saja. Ini terutama berlaku untuk perusahaan daerah yang mengerjakan proyek strategis pemerintah. "Untuk penyertaan modal yang menjadi KSD dan proyek multiyear (tahun jamak) harus tetap diprioritaskan," ujar dia, kemarin.

Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan Daerah, anggaran yang digunakan untuk pembiayaan dikurangi dari Rp 8,34 triliun menjadi Rp 2,4 triliun. Dalam komponen pembiayaan itu, terdapat alokasi penyertaan modal daerah untuk sejumlah BUMD sebesar Rp 7,8 triliun. Adapun suntikan modal yang dipertahankan hanya untuk PT MRT Jakarta sebesar Rp 2,4 triliun-meneruskan hibah dari pemerintah pusat-untuk melanjutkan pembangunan fase II.

Andyka menerangkan sejumlah kegiatan strategis daerah yang dibiayai melalui penyertaan modal, antara lain, adalah pembangunan Jakarta International Stadium oleh PT Jakarta Propertindo dan pembelian lahan untuk program hunian tanpa uang muka yang digarap Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Menurut Andyka, pemangkasan penyertaan modal proyek strategis itu kurang pas. "Harga tanah kan tambah lama juga tambah naik," kata politikus Gerindra itu.

Saat penyusunan APBD Jakarta 2020, PT Jakarta Propertindo mendapat penyertaan modal sebanyak Rp 2,7 triliun. Suntikan modal itu sebagian digunakan untuk kegiatan strategis seperti pembangunan Jakarta International Stadium dan revitalisasi Taman Ismail Marzuki. Adapun Pembangunan Sarana Jaya mendapatkan penyertaan modal sebesar Rp 1,3 triliun, yang akan digunakan untuk membeli tanah dan membangun hunian tanpa uang muka.

Andyka khawatir peniadaan penyertaan modal untuk pembangunan Jakarta International Stadium akan menimbulkan masalah baru berupa denda dari kontraktor. Sebab, pembangunan itu dilakukan oleh perusahaan berbeda, antara lain PT Wika Gedung, PT PP, dan PT Java Konstruksi.

Sekretaris Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah Jakarta Riyadi menjelaskan rencana pemangkasan suntikan modal bagi sejumlah perusahaan daerah masih dibahas. "Untuk perubahan PMD kami juga ada usulan, tapi kami belum bisa sampaikan karena masih dibahas," tutur dia.

Sumber Tempo di Balai Kota, yang mengetahui poses perubahan anggaran penyertaan modal daerah, menjelaskan pengurangan suntikan modal itu masih sebatas usul dari Badan Pengelola Keuangan Daerah. Usul ini didasarkan atas ketersediaan uang di kas pemerintah DKI. "Dari ketersediaan uang itulah BPKD menyusun perubahan anggaran daerah, termasuk untuk PMD," tutur dia.

Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta, Lusiana Herawati, tidak menjawab pertanyaan ihwal rencana pemangkasan penyertaan modal bagi sejumlah perusahaan daerah itu. "Saya sedang rapat," ujar dia

Direktur Proyek Jakarta International Stadium PT Jakarta Propertindo, Iwan Takwin, belum bisa menjelaskan secara rinci dampak jika pemerintah DKI meniadakan penyertaan modal untuk perusahaan daerah itu. "Ada beberapa skenario dan mitigasinya," ujar dia.

Iwan menerangkan hingga kemarin pembangunan stadion di Jakarta Utara itu masih berjalan. Saat ini, progres pembangunan stadion bagi kandang Macan Kemayoran itu telah mencapai 22 persen. "Sekarang sampai pekerjaan struktur," tutur dia.

. GANGSAR PARIKESIT